

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah merupakan salah satu dari proses manajemen, dalam hal ini adalah proses perencanaan, anggaran juga memberikan arah kepada seluruh organisasi baik pemerintah dengan sektor publik dan perusahaan yang berorientasi pada laba. Sebagai perencanaan, anggaran juga sebagai sarana dan fungsi kontrol untuk mengetahui bagaimana suatu program sudah dijalankan, apakah sesuai dengan rencana ataukah tidak sesuai dengan rencana. Proses pelaksanaan anggaran merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintah untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada awal tahun anggaran, langkah pertama yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran meliputi penetapan pejabat pengelola anggaran serta penerbitan dan pengesahan Dokumen Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran bagi masing-masing kementerian/lembaga dan instansi pemerintah lainnya.

Permasalahan anggaran dan pengelolaan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut

telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Meskipun demikian tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan manajemen keuangan daerah, antara lain Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Misi utama serangkaian kebijakan tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya baik keuangan daerah baik propinsi maupun kota dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Proses penyusunan anggaran haruslah dianalisis guna mengetahui kuat atau tidaknya unsur perencanaan keuangan. Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja organisasi. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi maka, harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Oleh karena itu penulis memilih judul : **"Analisis Kinerja Anggaran Pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Di Dinas Pendidikan Kota Blitar"**.

B. Permasalahan

Keberhasilan suatu program atau kegiatan tidak lepas dari adanya dana yang menjadi pendorong utama selain faktor latar belakang kegiatan tujuan dan kegunaan suatu kegiatan, apalagi pada organisasi yang bergerak sebagai pelayan publik (*public service*). Pemerintah sebagai salah satu organisasi yang melayani publik mempunyai bermacam kegiatan dalam menacapai tujuan yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan realisasi dari kegiatan tersebut adalah berupa dukungan dana berupa anggaran dari pemerintah. Setiap anggaran mempunyai tujuan seperti halnya pada anggaran yang dialokasikan pada Dana Alokasi Khusus (Dana Alokasi Khusus). Pada Dinas Pendidikan Kota Blitar setiap

tahunnya mendapatkan DAK yang telah diterimakan kepada Dinas dan kemudian dilanjutkan oleh dinas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juknis atau petunjuk teknis) yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah dana dialokasikan pada kegiatan yang telah diprogram sesuai dengan petunjuk teknis, permasalahan yang muncul adalah, apakah anggaran yang telah dikucurkan oleh negara melalui propinsi ini memenuhi sasaran dalam arti efektif dan efisien kinerja anggarannya. Apabila belum efektif dan belum efisien, maka harus dicari penyebabnya, sehingga untuk tahun anggaran berikutnya kinerja anggaran menjadi lebih baik lagi.

C. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana efisiensi dan efektifitas kinerja anggaran pada dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kota Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah : untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas kinerja anggaran pada dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kota Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian mampu memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai penyusunan anggaran dan penilaian kinerja anggaran sebagai suatu proses perencanaan pada perusahaan, terutama pada anggaran Dana Alokasi Khusus. Dan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa kuliah di STIE Kesuma Negara Blitar.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Kegunaan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi akademis maupun dari segi praktis. Dari segi akademis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi. Sedangkan kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran sesuai aturan yang berlaku sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

3. Bagi STIE Kesuma Negara

Kegunaan penelitian ini mampu menambah referensi dan wawasan sebagai bahan pustaka di lingkungan STIE Kesuma Negara Blitar yang diharapkan dapat memberikan informasi ilmu penyusunan anggaran dalam meningkatkan perencanaan keuangan perusahaan sebagai bahan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya serta untuk pihak-pihak yang membutuhkan.